

# Keragaman Gender & Seksualitas

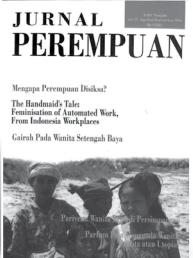
SOGIE-LGBT: Plurality of Gender &  
Sexualities

Diterbitkan oleh:



Yayasan Jurnal Perempuan

# Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan



Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp.9200,- Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.

Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya beroplah kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminism. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan mengimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 sahabat Jurnal Perempuan. Gabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp. 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan dan Jurnal Perempuan Muda secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

- **BCA KCP Menteng a.n Gadis A. Effendi, No. Rekening: 7350454416**
- **Bank Mandiri cabang Tebet Raya a.n Yayasan Jurnal Perempuan, No. Rekening 124-00-0497988-7**  
(Mohon bukti transfer difaks ke 021 83706747, attn: Andri Wibowo/Gerry)

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: [www.jurnalperempuan.org](http://www.jurnalperempuan.org)

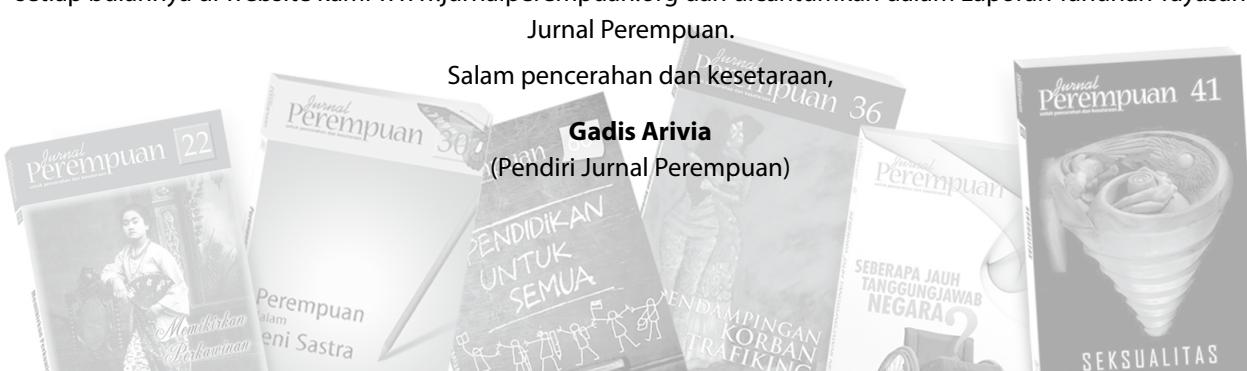
Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Mariana Amiruddin (Hp 08174914315, email: mariana@jurnalperempuan.com) dan Deedee Achriani (Hp 0818730289, email: deedee@jurnalperempuan.com).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada setiap tanggal 1 setiap bulannya di website kami [www.jurnalperempuan.org](http://www.jurnalperempuan.org) dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

**Gadis Arivia**

(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

**PENDIRI**

Dr. Gadis Arivia  
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno  
Ratna Syafrida Dhanny  
Asikin Arif (Alm.)

**DEWAN PEMBINA**

Melli Darsa, S.H., LL.M.  
Mari Elka Pangestu, Ph.D.  
Svida Alisjahbana

**PEMIMPIN REDAKSI**

Dr.Phil. Dewi Candraningrum

**DEWAN REDAKSI**

Dr. Gadis Arivia (Filsafat Feminisme, FIB Universitas Indonesia)  
Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum Feminisme, Universitas Indonesia)  
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL Universitas Indonesia)  
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University California at Berkeley)  
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer, Universitaet van Amsterdam)  
Mariana Amiruddin, M.Hum (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)  
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty of Arts, Monash University)  
Soe Tjen Marching, Ph.D (Sejarah dan Politik Perempuan, SOAS University of London)  
Manneke Budiman, Ph.D. (Sastra dan Gender, FIB Universitas Indonesia)

**MITRA BESTARI**

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Demografi & Gender, Universitas Indonesia)  
David Hulse, PhD (Politik & Gender, Ford Foundation)  
Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas Airlangga)  
Dr. Kristi Poerwandari (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)  
Dr. Ida Ruwaida Noor (Sosiologi Gender, Universitas Indonesia)  
Dr. Arianti Ina Restiani Hunga (Ekonomi & Gender, Universitas Kristen Satya Wacana)  
Katharine McGregor, PhD. (Sejarah Perempuan, University of Melbourne)  
Prof. Jeffrey Winters (Politik & Gender, Northwestern University)  
Ro'fah, PhD. (Agama & Gender, UIN Sunan Kalijaga)  
Tracy Wright Webster, PhD. (Gender & Cultural Studies, University of Western Australia)

Prof. Rachmi Diyah Larasati (Budaya & Perempuan, University of Minnesota)

Dr. Phil. Ratna Noviani (Media & Gender, Universitas Gajah Mada)

Prof. Merlyna Lim (Media, Teknologi & Gender, Carleton University)

Prof. Claudia Derichs (Politik & Gender, Universitaet Marburg)

Sari Andajani, PhD. (Antropologi Medis, Kesehatan Masyarakat & Gender, Auckland University of Technology)

Dr. Wening Udasmoro (Budaya, Bahasa & Gender, Universitas Gajah Mada)

Prof. Ayami Nakatani (Antropologi & Gender, Okayama University)

Assoc. Prof. Muhamad Ali (Agama & Gender, University California, Riverside)

Assoc. Prof. Paul Bijl (Sejarah, Budaya & Gender, Universiteit van Amsterdam)

Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Politik & Gender, Goethe University Frankfurt)

Assoc. Prof. Alexander Horstmann (Studi Asia & Gender, University of Copenhagen)

**REDAKSI PELAKSANA**

Elisabeth Anita Dhewy Haryono

**SEKRETARIS REDAKSI**

Andi Misbahul Pratiwi

**SEKRETARIAT DAN SAHABAT JURNAL PEREMPUAN**

Himah Sholihah

Andri Wibowo

Hasan Ramadhan

Abby Gina Boangmanalu

**DESAIN & TATA LETAK**

Agus Wiyono

**ALAMAT REDAKSI :**

Jl. Lontar No. 12 - Menteng Atas,

Setiabudi - Jakarta Selatan 12960

Telp. (021) 8370 2005 (hunting)

Fax: (021) 8370 6747

Email: yjp@jurnalperempuan.com

redaksi@jurnalperempuan.com

**WEBSITE:**

[www.jurnalperempuan.org](http://www.jurnalperempuan.org)

Cetakan Pertama, November 2015



**FORDFOUNDATION**

## Daftar Isi

**Catatan Jurnal Perempuan:** Mengapa SOGIE (*Sexual Orientation, Gender Identity and Expression*)? ..... iii

### Artikel / Articles

- Selarung Gerakan Lesbian dalam Epidemi Kebencian: Awal Advokasi SOGIE (*Sexual Orientation, Gender Identity and Expression*) di Nusantara / *Plurality of Lesbian Movements under Hatred-Epidemic: Initiation of SOGIE Advocacy in Nusantara* ..... 269-288  
*BJD. Gayatri*
- Diri, Tubuh dan Relasi: Kajian atas Transgender FTM (*Female to Male*) di Jakarta / *Self, Body, and Relation: a Study of FTM Transgender in Jakarta* ..... 289-302  
*Sri Agustine, Evi Lina Sutrisno & Dewi Candraningrum*
- "Mengapa Saya Mendirikan Suara Kita?" Sebuah Memoar / "Why I founded Our Voice": a Memoir ..... 303-308  
*Hartoyo*
- Penyebab atau Penyembuh? Kekerasan Seksual terhadap Lesbian, Biseksual, dan Transgender *Female-to-Male* di Indonesia / *Causes or Cures? Sexual Violence against Lesbian, Bisexual and Transgender Female-to-Male in Indonesia* ..... 309-314  
*Ayu Regina Yolandasari*
- Razia terhadap LGBT sebagai Agenda Moralitas Palsu: Kajian Pemberitaan Media di Indonesia / *Raids against LGBT as Fake Moral Agenda: a Study on News Media in Indonesia* ..... 315-320  
*Sari Andajani, Dinar Lubis & Sharyn Graham-Davies*
- Politik Gender dan Seksualitas: Transgender Indonesia dalam Konteks Masyarakat Indonesia dan Eropa Barat / *Gender Politics and Sexuality: Indonesian Transgender in the Context of Indonesia and Western Europe Society* ..... 321-327  
*Tanti Noor Said*
- Memetakan Tubuh, Gender, dan Seksualitas dalam Kajian Queer / *Mapping Body, Gender, and Sexuality in Queer Studies* ..... 329-338  
*Hendri Julius Wijaya*
- Hak Asasi Manusia LGBT dalam Kebijakan Dalam Negeri Indonesia / *LGBT's Human Rights in the Indonesian Interior Policies* ..... 339-355  
*Yulianti Muthmainnah*
- LGBT, Agama dan HAM: Kajian Pemikiran Khaled M. Abou El-Fadl / *LGBT, Religion, and Human Rights: a Study on Khaled M. Abou El-Fadl's Thoughts* ..... 357-366  
*Masthuriyah Sa'dan*
- "Makna Hidup" Bagi LGBT Ketika Negara Abai: Kajian Queer di Jakarta / "Meaning of Life" for LGBT when State Ignores: a Queer Study in Jakarta ..... 367-376  
*Gadis Arivia dan Abby Gina*

### Wawancara / Interview

- David Kloos: "Perempuan Konservatif Mendominasi Formasi Kepemimpinan" / *David Kloos: "Conservative Women dominate Formation of Leadership"* ..... 377-381  
*Saras Dewi*

**Kata dan Makna / Words and Meanings** ..... 383-385

### Profil / Profile

- Hana Salomina Hikayobi: "Terpanggil untuk Menyuarkan Kaum Tak Bersuara" / *Hana Salomina Hikayobi: "Compelled to voice the Voiceless"* ..... 387-392  
*Dewi Candraningrum & Anita Dhewy*

### Resensi Buku/ Book Review

- Tombois dan Femmes: Menantang Label Gender di Padang / *Tombois and Femmes: Against Gender Label in Padang* ..... 393-395  
*Nadya Karima Melati*

### Tokoh / Heroine

- Tunggal Pawestri: "Dukungan Terbuka terhadap LGBT akan Mengundang Dukungan Yang Lain" / *Tunggal Pawestri: "Open Support for LGBT invite Other Support"* ..... 397-404  
*Anita Dhewy*

# Mengapa SOGIE (*Sexual Orientation, Gender Identity and Expression*)?

**K**omisi Internasional tentang Hak Asasi LGBT (*The International Gay and Lesbian Human Rights Commission* (IGLHRC) merupakan sebuah organisasi non-pemerintah yang penting dalam menangani dan mengadvokasi isu pelanggaran HAM berbasis SOGIE (*sexual orientation, gender identity and expression*) ke PBB dan berbagai badan internasional lainnya. Organisasi ini tercatat dalam ESOSOC dan menjadikan organisasi untuk konsultasi yang dipercaya PBB, yang didirikan pada tahun 1990 oleh Julie Dorf di San Francisco. IGHLCR juga berkontribusi pada pembuatan Prinsip-Prinsip Yogyakarta (*Yogyakarta Principles*) di tahun 2010. Prinsip-prinsip Yogyakarta adalah prinsip-prinsip legal internasional mengenai orientasi seksual, identitas gender dan Undang-Undang internasional telah disampaikan kepada PBB dan pihak pemerintah dalam upaya memastikan keberadaan universal perlindungan HAM. Kelompok yang terdiri dari 29 ahli HAM internasional hari itu mengeluarkan pernyataan mengenai Prinsip-Prinsip Yogyakarta mengenai Aplikasi Undang-Undang HAM Internasional Dalam Kaitannya Dengan Orientasi Seksual dan Identitas Gender.

Prinsip-Prinsip tersebut menegaskan standar legal mengikat yang wajib dipatuhi oleh semua Negara. Prinsip-prinsip tersebut diadopsi oleh sekumpulan ahli dalam bidang Undang-Undang internasional dalam suatu pertemuan yang diselenggarakan di Yogyakarta, Indonesia. Anggota kelompok ahli tersebut terdiri dari mantan Komisioner Tinggi PBB untuk HAM, ahli independen PBB, anggota dan mantan anggota lembaga perjanjian HAM, hakim, akademisi dan pembela HAM. Dalam pengantar aksinya hal 6 dinarasikan: "Kita semua memiliki kesamaan hak asasi manusia. Apapun orientasi seksual, jenis kelamin, identitas gender, kebangsaan, ras/etnisitas, agama, bahasa dan status lain yang kita

sandang, kita semua memiliki hak-hak asasi manusia (HAM) tanpa boleh disertai dengan diskriminasi". Pada aksi tersebut diakui dengan jelas keberadaan HAM atas dasar SOGIE.

Seringkali bias kekerasan atas dasar SOGIE dikarenakan mereka dituduh sebagai perihal baru dan 'barat', yang pada kenyataannya dalam struktur tradisional masyarakat mana pun, akan dapat ditemui dengan mudah eksistensi individu atau kelompok yang memiliki keberagaman gender dan seksualitas. Di Indonesia, di kalangan komunitas Bugis misalnya, bahkan dikenal setidaknya ada lima gender yang berbeda. Yang analog sama adalah *oroane* (laki-laki) dan *makkunrai* (perempuan), dan tiga lainnya disebut sebagai *bissu*, *calabai*, dan *calalai*. *Bissu* mewakili aspek perempuan dan laki-laki, yang menjadi pemimpin spiritual setelah naik haji. *Calabai* mewakili aspek terlahir sebagai laki-laki dan kemudian menjadi perempuan.

*Sedang Calalai* mewakili aspek yang terlahir sebagai perempuan dan kemudian menjadi laki-laki. Di samping tuduhan tersebut, tuduhan yang kerap ada adalah sebutan "sakit-jiwa" atas dasar SOGIE mereka, padahal WHO, organisasi kesehatan dunia, telah menyatakan bahwa LGBT bukan fenomena sakit jiwa melainkan varian biasa dari seksualitas manusia.

Kini kita sudah memasuki era komunitas LGBTIQ (*Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex, Queer*) yang eksis dan berperan di dalam masyarakat. Namun masalahnya apakah komunitas LGBTIQ telah terrepresentasi secara adil di media? Kevin Barnhurst dalam bukunya berjudul "Media Queered" (2007), menjelaskan bahwa komunitas LGBTIQ telah lama dibungkam di media. Ia mengadvokasi perlunya visibilitas komunitas LGBTIQ di media agar memperlihatkan masyarakat yang plural. Media *mainstream* masih terjebak antara "menertawakan"

keciran LGBTIQ atau “mengeksotikan” dan bahkan kadang digambarkan sebagai “predator”. Padahal apa yang perlu dilakukan media adalah memperlihatkan adanya cara berada yang berbeda, unik dan sekaligus mentransformasikan perubahan dan mengikis homofobia (kebencian & ketakutan pada kalangan homo). Kritik terhadap media diperlukan agar media sadar atas ketidakadilan yang terjadi dan ikut memberdayakan masyarakat dengan pengetahuan yang mencerahkan. Sesungguhnya tujuan utama dari sensivitas media terhadap LGBT adalah untuk membangun dialog antara media dan komunitas LGBT dalam menegakkan HAM. Untuk itulah JP Edisi 87 ini diterbitkan.

Dalam bukunya *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity* (London: Routledge, 1999), Judith Butler menarasikan bahwa “Cultural configurations of sex and gender might then proliferate or, rather, their present proliferation might then become articulable within the discourses that establish intelligible cultural life, confounding the very binarism of sex, and exposing its fundamental unnaturalness. What other local strategies for engaging the ‘unnatural’ might lead to the denaturalization of gender as such?” (hal 190). Butler melemparkan kemungkinan yang melampaui binerisme, pada sesuatu yang kemudian manusia biasa menyebutnya sebagai alamiah. Teori Queer merupakan salah satu persebaran dari teori-teori kritis pos-strukturalis yang lahir pada tahun 1990-an dan disokong secara kuat dalam filsafat feminism. Di samping Butler, teori ini juga dibangun oleh nama-nama seperti Monique Wittig, Teresa de Lauretis, Lauren Berlant, Leo Bersani, Lee Edelman, Jack Halberstam, David Halperin, Jose Esteban Munoz, Eve Kosofsky Sedgwick, dan lain-lain.

“Bawa lesbian bukan perempuan” dilontarkan oleh Monique Wittig di tahun 1980 dalam “La Pensée straight” sebagai bagian dari mengurangi kecemasan modernitas dalam menghadapi esensialisme metafisika kehadiran (muasal politik identitas Foucault). Jika Beauvoir menyatakan bahwa seseorang tak terlahir sebagai perempuan, tetapi ‘menjadi’ perempuan; maka Wittig memberikan penekanan pada kata ‘perempuan’: bahwa seseorang

tak terlahir sebagai ‘perempuan’ secara alamiah. Kedua kalimat tersebut sama, tetapi karena penekanan yang berbeda, kemudian menghasilkan makna yang tidak sama dalam diskursus sosial, politik, ekonomi dan terlebih dalam politik linguistik dan politik identitas. Lesbian adalah konsep yang melampaui kategori, bagi Wittig, karena lesbian melampaui identitas laki-laki atau perempuan dalam statusnya atas reproduksi, atas perbudakan dalam keluarga. Sehingga, lesbian bukan perempuan, secara ekonomi, secara politik, secara ideologis. Lesbian sebagai identitas meretaskan dirinya dari identitas yang jangkal dari menjadi perempuan, baru kemudian sampai pada lesbian. Atau bahwa lesbian melakukan perjalanan bolak-balik, dari menjadi perempuan, dari menjadi laki-laki, atau sebut saja dengan mudah dari menjadi ‘lesbian’ saja. Ia mengalami dan memikirkan subjektivitas kognitifnya atas ruang konseptual yang amat berisiko dan berbahaya karena ia berada dalam lubang-hitam yang tak diakui dalam diskursus manusia atas ‘dunia’. Sedang bahasa sebagai jalan mediasi, jalan representasi, merupakan ‘alat pembunuhan’ pertama atas apa-apa yang berada di luar kategori sebagai ‘berbahaya’.

Diskursus ini dibangun dari pergulatan feminism dalam melawan ide bahwa gender merupakan entitas esensialis-diri yang dibentuk dan dikonstruksi secara sosial-budaya, yang kemudian melahirkan identitas seksual yang dianggap “alamiah” padahal bukan. Teori ini mendenaturalisasi apa-apa yang normatif dan apa-apa yang disebut sebagai ‘melenceng’ dari kodrat alam. Queer berfokus pada sirkulasi jenis kelamin, gender dan hasrat. Tak hanya itu, ia juga membahas perihal *cross-dressing* (cara berpakaian berbeda dari ‘kodrat’ gender), interseksualitas, ambiguitas gender dan operasi kelamin. Teori ini kurang begitu berkembang dalam kajian-kajian di Indonesia, meskipun telah ada, tetapi tidak sebanyak dalam Kajian Wanita. JP Edisi 87 ini diterbitkan untuk publik luas dengan menarasikan beberapa sejarah gerakan LGBTIQ di Indonesia, disamping juga melakukan penelitian-penelitian paling kontemporer oleh dari atas untuk LGBTIQ. (Pemimpin Redaksi, **Dewi Candraningrum**)

# Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 4, November 2015

## Lembar Abstrak/Abstracts Sheet

BJD. Gayatri. Aktivis untuk Social Justice, Pendiri Koalisi Perempuan Indonesia, . Pendiri Suara Ibu Peduli, Mantan Penasihat Internasional Asia-Pasifik IGLHRC 1993-1997

### **Selarung Gerakan Lesbian dalam Epidemi Kebencian: Awal Advokasi SOGIE (Sexual Orientation, Gender Identity and Expression) di Nusantara**

#### **Plurality of Lesbian Movements under Hatred-Epidemic: Initiation of SOGIE Advocacy in Nusantara**

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 4, November 2015, hal. 269-288, 1 gambar, 37 daftar pustaka.

This paper is an overview toward SOGIE (Sexual Orientation, Gender Identity and Expression). This charted the history of lesbianism in Indonesia. Approach being used is feminist personal history. There are two approaches in advocacy of human-right based SOGIE. First, the advocacy toward KUHP (product of law) that is based on positive and gender-normative that will endanger the existence of LGBT in Indonesia. Second, SOGIE-activists shall understand fully the plurality of gender and sexuality that is home-grown in Indonesia. This is the best way to advocate the rights as an integral part of Nusantara culture.

Keywords: SOGIE, LGBTIQ, feminist personal history, advocacy.

Makalah ini merupakan pengantar tentang keberagaman gender dalam SOGIE-HAM. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sejarah personal feminis (*feminist personal history*). Paper ini akan mengulas sejarah lahirnya gerakan lesbian di Indonesia. Terdapat dua hal untuk advokasi SOGIE ini. *Pertama* untuk perubahan dan perbaikan Undang-undang sedang terus terjadi di negeri Nusantara yang bhineka ini, misalnya melalui rancangan perubahan KUHP yang saat ini sedang berlangsung, yang akan mengkriminalisasi LGBTIQ, entah karena alasan panik moral atau apa. Dalam kerangka ini para akademisi atau ilmuwan profesi dan kelompok agama yang homofobik juga perlu dicermati. *Kedua*, negeri ini memiliki kekayaan “Keberagaman Gender dan Seksualitas” namun aktivis LGBTIQ, termasuk aktivis perempuan hampir tidak ada yang menggali kekayaan ini, sehingga kita tidak mengenali dan kemudian menjadi terasing dari akar-budaya sendiri.

Kata kunci: SOGIE (Orientasi Seksual, Identitas dan Ekspresi Gender), LGBTIQ, sejarah personal feminis, advokasi.

Sri Agustine, Evi Lina Sutrisno & Dewi Candraningrum.  
Ardhanary Institute & Jurnal Perempuan.  
[ardhanaryinstitute.org](http://ardhanaryinstitute.org)

#### **Diri, Tubuh dan Relasi: Kajian atas Transgender FTM (Female to Male) di Jakarta.**

#### **Self, Body, and Relation: a Study of FTM Transgender in Jakarta**

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 4, November 2015, hal. 289-302, 20 daftar pustaka.

The existence of *Male to Female* (MTF) or in Indonesian word known as *Waria* is more popular than *Female to Male* (FTM). Existence of FTM or someone biologically born as woman but identified herself as man is not well-researched and well-documented. That is why this group is difficult to be identified in the public discourse. Jakarta was chosen in this research as this city represented FTM from other areas around

Indonesia. This study found that someone that biologically woman is not automatically identified herself as woman. The process of self-definition is fluid. In the process of finding the self, FTM faced violences from states, society, work-place, and family.

Keywords: Self, FTM (Female to Male), Sex, Gender, Jakarta.

Eksistensi transgender *Male to Female* (MTF) atau yang secara umum sering kita dengar dengan istilah *Waria* lebih populer dibandingkan dengan transgender *Female to Male* (FTM). Eksistensi FTM atau seseorang yang terlahir secara biologis perempuan tetapi mendefinisikan dirinya sebagai laki-laki belum diangkat dan terdokumentasikan secara baik, sehingga eksistensi FTM sulit dikenali dalam diskursus publik. Pemilihan Jakarta sebagai area penelitian karena merupakan kota urban yang merepresentasikan Indonesia. Responden yang diinterview berjumlah 22 orang, dan di dalam perjalanan penelitian, 5 FTM dari luar Jakarta. Studi FTM ini menemukan bahwa seseorang tidak secara otomatis akan mendefinisikan gendernya sesuai dengan seks/jenis kelamin biologisnya. Mereka membentuk identitas dirinya sendiri secara subjektif melalui proses pendefinisian diri. Dalam perjalanan menuju “diri”, FTM mengalami banyak kekerasan baik dari Negara, masyarakat, tempat kerja dan keluarga.

Kata Kunci: Diri, FTM (Female To Male), Seks, Gender, Jakarta.

Hartoyo. Pendiri dan Ketua Suara Kita & Mahasiswa Pascasarjana Sosiologi Universitas Indonesia  
[www.suarakita.org](http://www.suarakita.org)

#### **“Mengapa Saya Mendirikan Suara Kita?” Sebuah Memoar**

#### **“Why I founded Our Voice”: a Memoir**

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 4, November 2015, hal. 303-308, 8 daftar pustaka.

Reformation Era has brought equality to any social movement such as LGBT circle. This era asked and gave opportunity to engage actively in the governance in many ways. Those that entered formal politics, or outside of formal politics such as NGO and community service. LGBT issue is becoming new term in the activism in Indonesia and that is why I established Suara Kita (Our Voice) to celebrate our identity and social justice. This paper narrated the establishment of this organization up to the present time under repression of the society.

Keywords: LGBT, Our Voice, reformation era, social justice.

Harus diakui reformasi membawa angin segar bagi setiap gerakan sosial dalam isu apapun, termasuk kelompok LGBT. Di era reformasi, publik dipaksa untuk terlibat secara aktif dalam pembangunan dengan beragam cara. Ada yang masuk ke politik formal, tetapi ada yang memilih di luar jalur atau sistem politik. Semua peluang itu terbuka di era reformasi. Tetapi harus diakui, pada isu LGBT karena gerakan identitas masih relatif baru dalam gerakan sosial, maka peluang reformasi baru bisa ditangkap atau direspon untuk mengangkat isu LGBT dalam wacana publik. Tulisan ini menjelaskan perjalanan Suara Kita sejak berdiri sampai dengan sekarang sebagai organisasi LGBT yang konsisten menyuarakan keadilan sosial.

Kata kunci: LGBT, Suara Kita, era reformasi, keadilan sosial.

Ayu Regina Yolandasari. Women's Studies, Ewha Womans University, Korea Selatan & Ardhany Institute. 52 Ewhayeodae-gil, Seodaemun-gu, Seoul, South Korea. Phone:+82 2-3277-2114

### **Penyebab atau Penyembuh? Kekerasan Seksual terhadap Lesbian, Biseksual, dan Transgender Female-to-Male di Indonesia**

### **Causes or Cures? Sexual Violence against Lesbian, Bisexual and Transgender Female-to-Male in Indonesia**

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 4, November 2015, hal. 309-314, 13 daftar pustaka.

Sexual violence is a crime in which the victims are usually blamed for being the cause. When it happened to a cisgender heterosexual woman, many people tend to use her appearance and her behavior to justify the victim blaming. It would even be more complicated for lesbian, bisexual women, or female-to-male transgender (LBT). When sexual violence happened to them, their sexual and/or gender identity tend to be added on the reasons to justify the perpetrators' actions. Strangely, in contrast to that, this crime is also usually thought as the cause of their being LBT. This paper is aimed to explore this paradoxical thoughts of sexual violence against LBT, its effects on LBT's lives, and efforts made to break through the paradox itself.

Keywords: LBT (Lesbian, Bisexual, Transgender), sexual violence, Indonesia.

Kekerasan seksual adalah sebuah kejahatan dimana korban sering kali menjadi pihak yang disalahkan karena dianggap sebagai penyebab terjadinya kejahatan tersebut. Ketika kejahatan ini terjadi pada perempuan cisgender heteroseksual, banyak orang yang cenderung menjadikan penampilan dan tingkah laku korban sebagai justifikasi untuk menyalahkannya. Saat kejahatan yang sama terjadi pada lesbian, perempuan biseksual, dan transgender *female-to-male* (LBT), situasinya pun menjadi lebih kompleks, di mana identitas seksual dan/atau identitas gender mereka cenderung dijadikan alasan tambahan untuk menjustifikasi tindakan pelaku terhadap mereka. Anehnya, berlawanan dengan hal tersebut, kejahatan ini juga sering kali dianggap sebagai penyebab seseorang menjadi LBT. Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi paradoks terkait kekerasan seksual terhadap LBT, dampaknya pada kehidupan LBT, dan upaya yang dilakukan untuk membongkar paradoks itu sendiri.

Kata kunci: LBT (Lesbian, Bisexual, Transgender), kekerasan seksual, Indonesia.

Sari Andajani, Dinar Lubis & Sharyn Graham-Davies. Faculty of Health and Environmental Sciences & Faculty of Culture and Society Auckland University of Technology . 55 Wellesley Street East, Auckland Central

### **Razia terhadap LGBT sebagai Agenda Moralitas Palsu: Kajian Pemberitaan Media di Indonesia**

### **Raids against LGBT as Fake Moral Agenda: a Study on News Media in Indonesia**

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 4, November 2015, hal. 315-320, 31 daftar pustaka.

As a signatory to the Beijing Convention, Indonesia has the responsibility to live up to certain expectations, one of these is to safe guard human rights and the right to freedom of sexuality and access to sexual health. In this article we show this is not the case. In particular, because police are allowed to conduct raids on hotels and people are too scared to be open about their sexuality. As a result of being scared, people are not

able to access sexual health care. Police raids are imposing a sexual morality agenda and the media is exploiting such raids by using horrific pictures, denigrating language maintaining stigmatization. If Indonesia is to get serious about HIV prevention, discrimination against GBV, police raids and violence against LGBT must stop.

Keywords: raids, sexual minorities, LGBT, HIV/AIDS.

Sebagai negara yang menandatangi Konvensi Beijing, Indonesia memiliki mandat dan tanggung jawab untuk mempromosikan, melindungi dan memenuhi hak warga negaranya akan hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi, tanpa diskriminasi. Artikel ini menunjukkan bahwa, situasi penegakan hak-hak asasi manusia akan kesehatan seksual dan reproduksi adalah sangatlah jauh dari harapan. Tulisan ini mengangkat wacana akan peran polisi dan masyarakat awam, kelompok *vigilante*, dalam melakukan razia di hotel-hotel dan tempat-tempat yang dinyatakan rentan akan perilaku seksual menyimpang. Yang kesemuanya itu memupuk rasa takut dan mereka kelompok ragam identitas gender dan seksualitas tidak dapat mengakses pelayanan kesehatan. Razia polisi yang diwacanakan sebagai agenda penegakan moralitas masyarakat dan eksploitasi media massa dengan gambar yang seram, tidak santun, bahasa yang melecehkan justru makin melestarikan stigma sosial terhadap kelompok LGBT. Apabila Indonesia mempunyai niat serius dengan upaya penanggulangan dan pencegahan HIV/AIDS, semua pelecehan terhadap kelompok-kelompok LGBT dan minoritas seksual lainnya haruslah dihentikan.

Kata kunci: razia, minoritas seksual, LGBT, HIV/AIDS.

Tanti Noor Said. Universiteit van Amsterdam. 1012 WX Amsterdam, Netherlands. Phone:+31 20 525 9111

### **Politik Gender dan Seksualitas: Transgender Indonesia dalam Konteks Masyarakat Indonesia dan Eropa Barat**

### **Gender Politics and Sexuality: Indonesian Transgender in the Context of Indonesia and Western Europe Society**

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 4, November 2015, hal. 321-327, 15 daftar pustaka.

This paper attempts to analyze how Indonesian gay males and transgenders male to female in two different social, cultural and political contexts (in Indonesia and Northern Europe) are actively engaged in the making of their own subjectivity. Their subjectivities are entangled with gender, sexuality, religion, romantic love relationships and kinship. They juggle in negotiating and making sense of norms and values of societies that projected towards them. This paper aims to shed light on gender politics of gay and transgender Indonesians in the context of heterosexual hegemony and migration.

Keywords: transnational migration, LGBT activism, gay, transgender.

Tulisan ini menganalisis bagaimana gay dan transgender dalam dua dunia yang berbeda, secara sosial, budaya dan politik, yaitu Indonesia dan Eropa Barat, aktif berpartisipasi dalam pembentukan subjektivitasnya. Subjektivitas gender dalam kajian ini terkait dan tak dapat dipisahkan dari seksualitas, agama, hubungan romantis mereka dengan laki-laki dari Eropa Barat dan tali ikatan persaudaraan mereka dengan keluarga mereka di Indonesia. Mereka berjuang menegosiasi norma dan nilai masyarakat yang yang diproyeksikan oleh masyarakat terhadap mereka. Kajian ini menyimpulkan bahwa subjektivitas gender dan seksual seseorang yang minoritas ditentukan oleh struktur yang dominan di dalam masyarakat.

Kata kunci: migrasi, transnasional, subjektivitas, aktivisme LGBT, gay, transgender.

Hendri Yulius Wijaya. Lee Kuan Yew School of Public Policy,  
National University of Singapore. 469C Bukit Timah Rd,  
Singapore 259772. Phone:+65 6601 2875

### **Memetakan Tubuh, Gender, dan Seksualitas dalam Kajian Queer**

#### **Mapping Body, Gender, and Sexuality in Queer Studies**

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 4, November 2015, hal. 329-338, 1 gambar, 1 tabel, 24 daftar pustaka.

This paper examines the complexities of human sexuality by challenging assumptions that have been built on binarism and biological-determinism. This attempt is done by examining the development of sexuality theory and studies from feminism to queer theory, through the lens of some theorists, from Michel Foucault, Judith Butler, Jack Halberstam, to Sara Ahmed. In addition, the development of sexuality studies in Indonesia is also explored, in order to show a myriad of interactions and relations of knowledge between global and local. Queer theory also provides space to criticize the hegemony of existing 'labels' which are originated from the West, and also to show that the meaning and subjectivity shaped by these labels are not always fixed when they are transferred to Indonesian context. For above reasons, this paper introduces the theoretical concept of sex(t)uality—in which sexuality operates like text.

Keywords: Sex, text, queer, global, local, feminism, sex(t)uality.

Makalah ini menganalisis kompleksitas seksualitas manusia dengan menantang asumsi-asumsi yang dibangun atas pemikiran biner yang biasanya memiliki kecenderungan deterministik biologi. Upaya ini dilakukan dengan memaparkan perkembangan teori seksualitas mutakhir, mulai dari feminism hingga kajian queer, melalui teori-teori Michel Foucault, Judith Butler, Jack Halberstam, hingga Sara Ahmed. Selain itu, perkembangan kajian seksualitas di ranah lokal juga turut dipaparkan untuk melihat bagaimana interaksi dan relasi pengetahuan antara tingkat global dan lokal. Pendekatan teori queer juga memberikan ruang untuk melakukan kritik terhadap hegemoni label seksualitas yang dibawa dari Barat dan menunjukkan bahwa label-label tersebut tidak selalu memiliki makna yang sama dengan asalnya. Inilah alasan mengapa konsep sex(t)uality/ seks(t)ualitas diperkenalkan di sini, bahwa seksualitas beroperasi seperti laiknya teks.

Kata Kunci: Seks, teks, queer, global, lokal, feminism, sex(t)uality.

Yulianti Muthmainnah. Program Studi Diplomasi, Pascasarjana Universitas Paramadina. The Energy Tower 22nd Floor, SCBD Lot. 11A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190

### **Hak Asasi Manusia LGBT dalam Kebijakan Dalam Negeri Indonesia1**

#### **LGBT's Human Rights in the Indonesian Interior Policies**

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 4, November 2015, hal. 339-355, 1 tabel, 37 daftar pustaka.

Human rights which were convened by international laws and United Nations is at present universally ideal. However in implementation, this universality was constrained by interior politics, sovereignty, religious interpretation, and culture. Issues of LGBT has received wave of protests internationally and nationally though their rights are guaranteed within laws. Include LGBT issue has been debated on the national and local level. On the other hand, state has responsibility to promote, to protect, and to fulfill human rights for every single person, even people with sexual orientation and gender identity from any harms and violences. This paper will explore how human rights in Indonesia interior politics will protect LGBT groups.

Keywords: human rights, LGBT, interior politics.

Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah disepakati hukum internasional dan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) secara ideal harus bersifat universal. Akan tetapi, dalam implementasinya, atas nama kepentingan dalam negeri, keadautan negara, agama, ataupun budaya, keuniversalitasan HAM ini dibatasi oleh negara atau pihak-pihak tertentu, sehingga HAM menjadi relatif dalam pelaksanaannya. Termasuk pada isu LGBT yang masih menuai perdebatan baik di tingkat lokal maupun nasional. Padahal pengakuan, perlindungan dan pemenuhan HAM LGBT menjadi tanggung jawab negara. Tulisan ini akan mengurai bagaimana hak asasi manusia LGBT dilaksanakan dalam kebijakan dalam negeri Indonesia.

Kata kunci: hak asasi manusia, LGBT, politik dalam negeri.

Masthuriyah Sa'dan. Solidaritas Perempuan Kinasih & UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281. Telp:(0274) 589621

### **LGBT, Agama dan HAM: Kajian Pemikiran Khaled M. Abou El-Fadl**

#### **LGBT, Religion, and Human Rights: a Study on Khaled M. Abou El-Fadl's Thoughts**

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 4, November 2015, hal. 357-366, 16 daftar pustaka.

The Fatwa "Haram" of MUI against homosexual orientation (LGBT) and the death penalty against LGBT had shaken the Indonesian, and further marginalized "third" gender people. "Religion" is urged to provide justice to the Ummah but the Ulema did the opposite thing by discriminating sexual minorities. The legal instrument of regional, national and international human rights has recognizes LGBT rights as basic human rights. Islamic religion in this case Shari'ah and Islamic law is used as a theological foundation by MUI to issued the fatwa that is contrary to the concept of human rights. The progressive interpretation of Khaled M. Abou El-Fadl became important to be studied to protect LGBT. Khaled attempted to break up the tension between religion (Islam) and human rights by using the social approach of contemporary humanities. By this means, Abou El-Fadl introduced a scheme of protection to LGBT under Quranic Syariah Law.

Keywords: LGBT, religion, human rights, Khaled M. Abou El-Fadl.

Fatwa "haram" MUI terhadap kelompok homoseksual (LGBT) dan hukuman mati terhadap pelaku seksual "menyimpang" membuat rakyat Indonesia terguncang, khususnya mereka yang merasa memiliki identitas gender "ketiga". "Agama" yang seharusnya memberikan jalan kemudahan, seolah-olah mengubur hidup-hidup seseorang yang memiliki orientasi seksual homo. Padahal, instrumen hukum regional, nasional dan internasional tentang HAM mengakui hak-hak mereka sebagai manusia. Agama Islam dalam hal ini syari'ah dan hukum Islam yang dijadikan landasan teologis fatwa MUI bertolak belakang dengan konsep HAM. Dengan demikian, pemikiran Khaled M. Abou El-Fadl menjadi penting untuk dikaji. Khaled berupaya melerai ketegangan antara agama (Islam) dan HAM dengan menggunakan pendekatan *social humanity contemporary*.

Kata kunci: LGBT, Agama, HAM, Khaled M. Abou El-Fadl.

Gadis Arivia dan Abby Gina. Departemen Filsafat, FIB,  
Universitas Indonesia. Kampus UI Depok Jawa Barat  
16424, Indonesia. Telepon, : +62.21.7270009. Faksimile, :  
+62.21.7270038

**"Makna Hidup" Bagi LGBT Ketika Negara Abai: Kajian Queer di Jakarta**

**"Meaning of Life" for LGBT when State Ignores: a Queer Study in Jakarta**

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 4, November 2015, hal. 367-376, 1 gambar, 9 tabel, 16 daftar pustaka.

This study provides an overview of problems faced by LGBT in Indonesia. There are four issues raised i.e. the meaning of gender and sexual orientation, violence and abuse, the role of the state , and the meaning of happiness. This study uses a sample of 60 respondents living in big cities, especially in Jakarta. However, the strength of this study lies not in the result of the survey, but the result of the in-depth interviews.

From this study it was found that in the context of a conservative state, the respondents are more open through interviews. This study unearth LGBT's meaning of life under the repressive and absence role of the state.

Keywords: LGBT, meaning of life, violence, state.

Penelitian ini memberikan gambaran tentang persoalan yang dihadapi LGBT di Indonesia. Ada empat isu yang mengemuka yaitu soal makna gender dan orientasi seksual, kekerasan dan pelecehan, peran negara, dan makna hidup bahagia bagi LGBT. Penelitian ini menggunakan 60 sample responden yang hidup di kota besar terutama di Jakarta. Namun, kekuatan dari penelitian ini tidak terletak pada hasil survei melainkan pada hasil wawancara mendalam. Dari penelitian ini ditemukan bahwa para responden, dalam konteks negara konservatif, lebih bisa terbuka lewat wawancara dan bukan lewat pengisian kuesioner. Kajian ini mengungkap makna hidup bagi LGBT di bawah Negara yang represif dan abai pada kelompok minoritas.

Kata Kunci: LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender), makna hidup, kekerasan, negara.

# Razia terhadap LGBT sebagai Agenda Moralitas Palsu: Kajian Pemberitaan Media di Indonesia

*Raids against LGBT as Fake Moral Agenda: a Study on News Media in Indonesia*

**Sari Andajani, Dinar Lubis & Sharyn Graham-Davies**

Faculty of Health and Environmental Sciences & Faculty of Culture and Society Auckland University of Technology. 55 Wellesley Street East, Auckland Central

[sari.andajani@aut.ac.nz](mailto:sari.andajani@aut.ac.nz)

Naskah Diterima 8 Agustus 2015. Direvisi 31 Agustus 2015. Disetujui: 21 September 2015

---

## Abstract

As a signatory to the Beijing Convention, Indonesia has the responsibility to live up to certain expectations, one of these is to safe guard human rights and the right to freedom of sexuality and access to sexual health. In this article we show this is not the case. In particular, because police are allowed to conduct raids on hotels and people are too scared to be open about their sexuality. As a result of being scared, people are not able to access sexual health care. Police raids are imposing a sexual morality agenda and the media is exploiting such raids by using horrific pictures, denigrating language maintaining stigmatization. If Indonesia is to get serious about HIV prevention, discrimination against GBV, police raids and violence against LGBT must stop.

Keywords: raids, sexual minorities, LGBT, HIV/AIDS.

---

## Abstrak

Sebagai negara yang menandatangani Konvensi Beijing, Indonesia memiliki mandat dan tanggung jawab untuk mempromosikan, melindungi dan memenuhi hak warga negaranya akan hak-hak kesehatan seksual and reproduksi, tanpa diskriminasi. Artikel ini menunjukkan bahwa, situasi penegakan hak-hak asasi manusia akan kesehatan seksual and reproduksi adalah sangatlah jauh dari harapan. Tulisan ini mengangkat wacana akan peran polisi dan masyarakat awam, kelompok *vigilante*, dalam melakukan razia di hotel-hotel and tempat-tempat yang dinyatakan rentan akan perilaku seksual menyimpang. Yang kesemuanya itu memupuk rasa takut dan mereka kelompok ragam identitas gender and seksualitas tidak dapat mengakses pelayanan kesehatan. Razia polisi yang diwacanakan sebagai agenda penegakan moralitas masyarakat and eksplorasi media massa dengan gambar yang seram, tidak santun, bahasa yang melecehkan justru makin melestarikan stigma sosial terhadap kelompok LGBT. Apabila Indonesia mempunyai niat serius dengan upaya penanggulangan and pencegahan HIV/AIDS, semua pelecehan terhadap kelompok kelompok LGBT and minoritas seksual lainnya haruslah dihentikan.

Kata kunci: razia, minoritas seksual, LGBT, HIV/AIDS.

---

## Pendahuluan

November 2006, di tengah keprihatian terhadap diskriminasi and kekerasan yang dialami kelompok minoritas seksual, komisi Ahli Hukum International (International Service for Human Right) and ahli hak asasi manusia (HAM) dari 25 negara, menyepakati Prinsip Yogyakarta (*Yogyakarta Principles on the Application of International Human Rights Law in Relation to Sexual Orientation and Gender Identity*). Telah dirumuskan 29 Prinsip Yogyakarta, yang menetapkan prinsip-prinsip HAM guna mengatasi pelecehan hak asasi manusia yang dialami oleh kelompok lesbian, gay, biseksual, transgender (LGBT) and transeksual. Prinsip Yogyakarta mengembangkan prinsip HAM universal and non-diskriminatif dalam

konteks keberagaman identitas gender and orientasi seksual. Lebih jauh, prinsip Yogyakarta telah menjadi bagian dari pertemuan UNHCR (United Nations Human Rights Council/Dewan HAM PBB) yang dilandasi berbagai hukum HAM internasional, termasuk Kovenan Internasional mengenai Hak Sipil and Politik (ICCPR/International Convention on Civil and Political Rights); Kovenan internasional Hak Ekonomi, Sosial and Budaya (ICESR/International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights); and CEDAW/Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (Larasati, 2015). Setiap orang, di depan hukum, berhak menikmati HAM tanpa didasarkan pada identitas gender atau orientasi seksualitas. Di era Beijing+20 and menjelang dasawarsa peringatan

Prinsip Yogyakarta, tepatlah untuk mempertanyakan sejauh manakah pencapaian Indonesia dalam melindungi HAM dari kelompok-kelompok ragam gender dan orientasi seksualitas.

Indonesia, sebagai negara yang heteronormatif, konsep 'normalitas seksualitas' didasarkan pada pernikahan heteroseksual antara seorang pria and seorang perempuan dan anak-anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut. Konsep ini mendukung kuat dikotomi nilai-nilai dan norma-norma maskulin dan feminin. Banyak tulisan yang membahas tentang konteks heteronormatif dan dikotomi gender maskulin dan feminin di Indonesia. Misalnya tulisan-tulisan tentang peran dan status perempuan Indonesia sebagai pengikut suami (Jawa: *konco wingking*), pendidik anak-anak, abdi keluarga dan negara. Perempuan juga didiskursifkan sebagai yang selalu penuh pengertian, mengalah, meletakkan kepentingannya keluarga dulu, and tidak mementingkan dirinya sendiri (Locher-Scholten & Niehof, 1992; Suryakusuma, 1987; van Bemmelen, 1992; Wieringa, 1992). Menarik juga tulisan-tulisan tentang peran perempuan yang terbatas dalam area domestik (seputar rumah saja, sebagai istri dan ibu) and pendukung suami, yang merepresentasi budaya heteronormatif di Indonesia (Blackwood, 1995; Brenner, 1995; Robinson, 2000; Sen, 1996).

### Kriminalisasi LGBT dan HIV/AIDS

Pada tahun 1987, kasus AIDS pertama di Indonesia di laporkan di Bali pada seorang turis pria mancanegara (Mboi & Smith, 2006). Meski sampai akhir 1990, perkembangan epidemi HIV/AIDS di Indonesia cenderung lambat and hanya pada daerah yang terisolasi yang bersentuhan dengan nelayan Thailand (Riono, 2004), namun menjelang pergantian abad 21, kasus HIV positive naik dengan tajam khususnya dikalangan pengguna napza suntik (Riono & Jazant, 2004). Saat ini, epidemi HIV di Indonesia dikategorikan dalam epidemi terkonsentrasi (concentrated epidemic) yang artinya prevalensi kasus lebih dari 5% pada kelompok berisiko tinggi and kurang dari 1% pada kelompok masyarakat umum (UNAIDS, 2011). Adapun kelompok risiko tinggi ini adalah lelaki, perempuan and waria pekerja seks (PSK), pengguna napza suntik, kelompok lelaki seks dengan lelaki (LSL) and waria. Dalam kurun waktu 2001-2012, kasus HIV baru meningkat hampir 300% (UNAIDS, 2013). Sampai dengan bulan Desember 2014, dalam laporan triwulan kementerian kesehatan, kumulatif kasus HIV yang

dilaporkan mencapai hampir 150.000, dengan kasus terbanyak pada kelompok umur 20-49 tahun (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia [Kemenkes], 2015). Menariknya angka ini masih jauh dibawah kasus yang dilaporkan UNAIDS yang sekitar 610.000 (UNAIDS 2013).

Kriminalisasi dan diskriminasi kelompok-kelompok LGBT merupakan salah satu kendala serius dalam upaya pencegahan and pengobatan HIV. Kelompok-kelompok risiko tinggi enggan mengakses pelayanan HIV dikarenakan takut menerima sanksi sosial atau hukum. Sebanyak 18 dari 38 negara di Asia Pasifik mengkriminalisasikan hubungan seks sejenis. Di Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak secara tegas melarang homoseksual yang dilakukan antar orang dewasa. Yang dilarang di KUHP adalah homoseksualitas terhadap anak-anak di bawah umur. Juga perkawinan homoseksual tidak diakui oleh Undang-Undang Perkawinan (UU NO 1/1974). Bahkan di beberapa provinsi and kota di Indonesia memberlakukan hukum Syariah. Misalnya di Palembang, hubungan seksualitas sejenis dikenakan denda atau hukuman penjara. Di Provinsi Aceh, seorang gay dikenakan hukuman cambuk rotan and 100 bulan penjara. Hanya beberapa bulan yang lalu, Majelis Ulama Indonesia memberikan catatan bahwa 'penyimpangan perilaku seksual' sebagai kejahatan keji and dosa besar (Tempo, 2015).

### Razia dalam berita-berita

Beberapa tulisan penting tentang keberagaman gender and orientasi seksualitas di Indonesia (Boellstorff, 2000; Davies, 2007, 2011; Oetomo, 1996; Wieringa, 1997) menunjukkan bahwa dalam beberapa hal, masyarakat Indonesia sebenarnya cukup toleran terhadap mereka dengan identitas gender atau orientasi seksualitas 'alternatif'. Kerangka politik and konteks sosial yang heteronormatif membuat mereka yang memiliki gender and orientasi seksualitas yang berbeda, menjadi outsider, kelompok terpinggir bahkan tak jarang mereka dikejar-kejar and dihukum oleh aparat penegak hukum. Misalnya, dalam pemberitaan media massa sehari hari, kita sering membaca and mendengar adanya razia terhadap kelompok LGBT. Kita juga mendengar gunjingan sosial and ujaran-ujaran yang melecehkan kelompok LGBT. Homoseksualitas tidaklah ilegal di Indonesia, namun aparat hukum seperti kepolisian negara masih saja sering melakukan razia terhadap kelompok ini. Menurut Dede Oetomo, salah seorang aktivis

keberagaman seksualitas di Indonesia, bahwa satu hal yang paling susah untuk diubah adalah bagaimana agar oknum polisi tidak melakukan tindakan brutal terhadap trans-perempuan (laki-laki berganti jenis kelamin perempuan) (Oetomo, 2001).

Dampak razia polisi dan jajarannya terhadap kelompok minoritas seksual, secara tidak langsung dapat mengakibatkan semakin menguatnya stigma atau cap buruk pada kelompok LGBT dan pada akhirnya dapat menjadi penghambat upaya nasional untuk mencegah dan menurunkan penyebaran HIV/AIDS di Indonesia. Menghilangkan stigma dan diskriminasi (*Zero Stigma and discrimination*) merupakan salah satu visi penting dari UNAIDS dalam upaya mendukung terciptanya ‘zero’ kasus baru dan kematian akibat HIV (UNAIDS, 2010).

Sangat mudah untuk dipahami, bahwa akan sulit sekali untuk melakukan penjangkauan pada kelompok-kelompok LBGT bila mereka selalu dikejar-kejar, dikutuk, musuh oleh masyarakat dan penyelenggara negara, melalui aparatnya. Mereka menjadi semakin tersingkir, tersamar di masyarakat, dan cenderung untuk tidak mengakses pelayanan kesehatan yang tersedia (misalnya *HIV testing*, konseling and pengobatan ARV/Anti-Retroviral). Luasnya diskriminasi dan stigma sosial pada kelompok ini lebih jauh semakin meminggirkan dan menjauhkan mereka dari pembangunan ekonomi, sosial, dan politik. Tulisan ini membahas tentang mekanisme razia di Indonesia dan pemikiran kritis tentang dampaknya terhadap upaya penanggulangan HIV/AIDS.

Di Indonesia seringkali kelompok LGBT dimasukkan dalam definisi penyimpangan sosial atau penyakit sosial (pekat). Definisi ini diperkenalkan lebih dari 50 tahun yang lalu oleh MPRS Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia<sup>1</sup> dalam Ketetapan MPRS II/TAP/MPRS/1960 yang mendefinisikan kelompok pekat termasuk pengemis, pelacuran, perjudian, pemadatan, pemabukan. Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya diberikan kewenangan dan tugas untuk mencegah dan menanggulangi masalah penyakit sosial ini, sebelum menjadi menyebar dan meresahkan di masyarakat. Peran POLRI, pada waktu itu dikutip dalam UU Kepolisian No. 13 Tahun 1961 dan UU Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002, dan POLRI diharapkan bekerja sama dengan Departmen Kesejahteraan Sosial dan institusi terkait lainnya ([balianzahab.wordpress.com](http://balianzahab.wordpress.com)).

Dalam penelitian ini dikumpulkan sebanyak 33

pemberitaan dari 14 harian nasional yang dapat dibeli di Bali, antara tahun 2009-2013. Pemberitaan itu terbit dalam pemberitaan harian cetak maupun elektronik. Sumber berita termasuk Bali Pos, Jawa Pos, Denpasar Pos, Kompas, Balipost.com, Metrobali.com, Jawapost.com, Tribunnews.com, Kompas.com, Denpasarpost-Bisadiperluya.com. Harga edisi harian cetak berkisar antara 6000-10.000 rupiah. Pemberitaan di internet umumnya gratis, sedangkan harian cetak bisa diperoleh eceran di kios majalah atau berlangganan bulanan. Dari semua harian itu, Kompas (PT Kompas Media Nusantara) merupakan harian terkemuka nasional dengan oplah terbesar di Indonesia bahkan di Asia Tenggara. Kompas pertama kali terbit di tahun 1965, saat ini mencapai 20 pembaca aktif perbulan dan 120 juta *view-page* di Kompas.com (Setyawan, 2014). Harian Jawa Pos (Jawa Pos Group) juga merupakan harian terkemuka yang berpusat di Surabaya, Jawa Timur, dengan sirkulasi yang menyebar di seluruh Jawa Timur, Bali, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Harian Jawa Pos pertama diterbitkan di tahun 1949. Harian Bali Pos (Bali Pos Media Group/BPMG), merupakan harian terbesar di Bali, yang diterbitkan di akhir tahun 1940-an. Penulis secara sistematis mencari pemberitaan tentang razia terhadap kelompok LBGT.

Penulis menggunakan operasi *Bolean*, misalnya menggunakan kata penghubung “AND”, “OR”, “NOT” or “AND NOT” saat melakukan pencarian berita melalui internet. Kata-kata kunci yang digunakan misalnya razia, homo and hombreng, benci, bencong, waria, PSK or pekerja seks komersial). Selain itu penulis juga menggunakan beberapa kata kunci tipe-tipe razia, misalnya razia ketupat, razia yustisi, razia pekat, razia AND homo, razia AND PSK, razia AND Banci, Razia AND Bencong, Razia AND waria and Razia AND hombreng. Misalnya razia ketupat digunakan untuk pemberitaan tentang razia yang umumnya dilakukan sekitar bulan Ramadan. Razia pekat (penyakit sosial) biasanya ditargetkan untuk pekerja seks komersial, gelandangan, pengemis, homoseksual, atau waria (transgender, wanita-pria). Semua tulisan yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara isi dan temanya, untuk melihat pola tema-tema yang umumnya dominan dalam pemberitaan. Tema-tema yang terkumpul selanjutnya didiskusikan oleh tim peneliti, untuk mencapai kesepakatan. Berikut adalah tema-tema yang menonjol yang ditemukan dalam pemberitaan tentang razia atau penggrebegan. Tempat razia selalu dikaitkan dengan tempat yang

kumuh, gelap, atau berstatus sosial ekonomi kelas bawah.

### Tempat, waktu, dan target razia

Razia umumnya terjadi di hotel, lokalisasi, tempat hiburan malam, dan indekos yang dianggap rentan menjadi tempat aktivitas seksual. Tempat penginapan yang menjadi target razia biasanya kelas ekonomi, seperti losmen, motel atau wisma (hotel kelas melati atau bintang dua). Pelaksanaan razia bisa saja mengalami perubahan dari yang direncanakan semula. Misalnya pada perencanaan semula adalah melakukan razia Kartu Tanda Penduduk (KTP), namun bisa berubah menjadi Razia PSK dan homoseksual. Razia yang memiliki target yang jelas, misalnya razia pekerja seks komersial (PSK), razia homo dan razia pengguna obat terlarang. Contoh lainnya, razia gelandangan dan pengemis, razia preman, waria, atau penduduk gelap (pendatang yang tidak memiliki izin berdomisili), dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Razia pekat misalnya, untuk menjaring gelandangan, pengemis, pemabuk, pelacuran. Operasi ketupat atau razia ketupat biasanya dilakukan di saat bulan puasa atau menjelang Ramadhan yang berkaitan dengan razia petasan dan minuman keras. Razia biasanya dilakukan pada malam hari. Sebagai hasil dari razia rutin terhadap kelompok PMKS dan LGBT, beberapa dari PMKS dan LGBT yang ter-razia dapat saja dikirim ke dinas sosial untuk pembinaan (misalnya gelandangan dan PSK).

Pemberitaan di media tentang razia biasanya dikemas sebagai ‘kejutan’ bagi korban. Korban sering digambarkan tidak punya kesempatan untuk ‘kabur’ atau ‘tertangkap basah’. Misalnya ‘saat digrebek, beberapa pasangan tengah bugil’ atau ‘tengah melakukan hubungan suami-istri’. Saat diinterogasi, pasangan sering mengaku sedang berpacaran dan akan menikah. Tak jarang identitas korban tidak disamarkan, nama korban, dengan usia dan alamat, tak jarang termuat di pemberitaan. Hak korban akan privasi dan kerahasiaan menjadi tersampingkan.

### Kelompok ‘penjaga’ moralitas dan keamanan di masyarakat

Pelaksanaan razia umumnya ditanggapi secara positif oleh masyarakat. Pada umumnya masyarakat melihat hal ini sebagai upaya untuk menjaga kerukunan, menangani penyakit yang terdapat di

dalam masyarakat, mengatasi terjadinya penyimpangan sosial dan pelanggaran hukum yang dapat meresahkan masyarakat. Di sisi lain, interpretasi atau pemahaman masyarakat tentang penyakit sosial umumnya subjektif dan dipengaruhi oleh latar belakang keluarga, agama, adat, dan pendidikan. Hal ini menunjukkan betapa kaburnya pemahaman tentang razia baik oleh aparat negara maupun masyarakat sendiri. Pemberitaan tentang razia juga sering memunculkan kelompok-kelompok intoleran (*vigilante*), entah itu yang berasaskan etnik atau keagamaan (*ethnic or religious vigilante*) (Imparsial the Indonesian Human Rights Monitor, 2012), misalnya Forkab atau Forum Komunikasi Anak Betawi di Jakarta atau Forum Pembebas Islam (FPI) (Brown & Wilson, 2007; JakartaGlobe, 2015). Tak jarang kelompok-kelompok intoleran ini justru melakukan tindakan anarkis yang justru meresahkan masyarakat dan menjadi tantangan tersendiri bagi polisi dalam melaksanakan tugasnya menjaga keamanan (Brown & Wilson, 2007; Hukum online, 2012). Kelompok ini tak jarang main hakim sendiri. Selain polisi dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan kelompok-kelompok vigilante bahkan sering menyebut dirinya sebagai ‘penegak moralitas’ bangsa (Araf, 2010; Republika Online, 2011)

### Bahasa (i) moralitas dan diskriminatif dalam pemberitaan

Seringnya, judul atau pemberitaan menggunakan bahasa yang melecehkan dan merendahkan; bukan bahasa santun. Mungkin ini adalah disengaja untuk menarik perhatian pembaca. Kompas dan Jawa Pos tidaklah terkecuali. Istilah penyakit sosial (pekat) yang ditujukan untuk mengutuk kelompok-kelompok LGBT. Judul atau *headlines* biasanya menggunakan istilah bencong untuk gay dan homoseksual. Dalam bahasa Jawa, ‘bencong’, bisa diartikan tidak lurus (*not straight* – atau bukan heteroseksual). Istilah melecehkan lainnya misalnya ‘banci’. Demikian pula dengan istilah perilaku imoral yang digunakan seperti ‘selingkuh’, ‘berahi tinggi’, ‘mesum’, ‘maksiat’, ‘tidak bermoral’, ‘kelewatan batas’<sup>2</sup>. Pemberitaan juga mengacu pada kelompok-kelompok yang layaknya memiliki ‘moral standard’ yang baik seperti pegawai negeri sipil, bahkan anggota satuan kepolisian tak jarang juga tertangkap dalam razia (misalnya polwan atau polisi wanita, anggota brimob/brigadir mobil). Konotasi negatif dari istilah ‘pelacur’ misalnya berasal dari kata dasar ‘lacur’ yang dalam kamus Bahasa Indonesia berarti

'malang, gagal, terkutuk, celaka, sial, atau seseorang dengan perilaku buruk'. Istilah 'perek' juga sering digunakan menggantikan istilah pelacur. Berbagai istilah sejenisnya, misalnya 'pecun' (perek culun) atau 'pelacur imut, untuk PSK di bawah umur (Surtees, 2004). Menariknya terminologi di atas sangatlah jarang digunakan dalam diskusi sehari-hari atau formal. Ini mungkin mengindikasikan, bahasa spesifik yang digunakan media, yang secara dapat dikatakan secara sengaja melakukan eksplorasi atas upaya razia, yang justru semakin meminggirkan, dan membuat kelompok-kelompok ini semakin sulit terjangkau.

### Penutup: Diskriminasi dalam razia

Razia dapat dikatakan hal yang biasa dijumpai dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Razia lebih dilihat sebagai hal positif guna memberikan rasa nyaman dalam masyarakat. Polisi sebagai perangkat keamanan di Indonesia memegang peran penting, bahkan mendapat legalitas dalam upaya memberantas penyakit masyarakat. Tak jarang masyarakat bahkan berperan penting dalam melaporkan kegiatan yang meresahkan di lingkungan tempat tinggalnya termasuk dalam melaporkan kegiatan kelompok-kelompok LGBT atau kegiatan seksual yang dianggap mereka tidak 'normal'. Acuan norma-norma 'heteronormatif' pada masyarakat menempatkan kelompok dengan ragam gender dan orientasi seksualitas yang non 'heteronormatif' menjadi rentan akan pelecehan dan menjadi target razia.

Sangatlah disayangkan razia justru didominasi oleh upaya yang sering dikemas sebagai 'menegakkan moralitas' yang tak jarang semakin mendiskriminasi kelompok-kelompok yang rentan terhadap HIV/AIDS. Proses razia yang digambarkan media sebagai upaya penanggulangan penyakit sosial dan kriminalisasi kelompok LGBT, akan semakin memperbesar hambatan upaya pencegahan HIV/AIDS di Indonesia. Kelompok LGBT, akan semakin termarginalkan, sulit dijangkau, dan enggan mengakses pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi yang tersedia.

Penelitian banyak menunjukkan bahwa upaya promosi kesehatan terhadap mereka yang paling rentan lah yang terpenting, untuk mencapai sukses. Perangkat hukum perlu memberikan perlindungan bagi kelompok-kelompok terpinggir dan rentan untuk merasakan hak-hak asasi manusia dalam mengakses pelayanan kesehatan yang terbaik, yang terjangkau, dan bebas dari diskriminasi. Kiranya

besar harapan kita bahwa Prinsip Yogyakarta menjadi batu acuan untuk upaya ini. Salah satu tantangan terbesar adalah upaya penyadaran bahwa mekanisme razia yang terjadi sekarang ini memiliki dampak buruk dan semakin memmarginalkan kelompok rentan HIV/AIDS. Pelaksanaan razia dengan pemberitaan media yang tidak santun dan tidak mendidik, justru mempertebal prasangka negatif masyarakat, mempertebal stigma dan rasa kebencian sosial terhadap kelompok risiko tinggi ini. Jika tidak perubahan, maka janganlah heran, bila upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia akan lambat sekali dan hanya merupakan pemborosan uang negara saja.

### Daftar pustaka

- Araf, A. (2010). Militarism in 'Satpol PP' *The Jakarta Post* (15 July ed.). Jakarta: Jakarta Post.
- balianzahab.wordpress.com. Prostitusi? Why? Bagian 1. *E-Journal, Makalah, Berita, Paparan dan Diskusi masalah hukum 'Law education'*. Retrieved from <https://balianzahab.wordpress.com/makalah-hukum/hukum-kepolisian/prostitusi-why/>
- Blackwood, E. (1995). Senior Women, Model Mothers, and Dutiful Wives: Managing Gender Contradictions in a Minangkabau Village. In A. Ong & M. Peletz (Eds.), *Bewitching Women, Pious Men: Gender and Body Politics in Southeast Asia* (pp. 124-158). Berkeley: University of California Press.
- Boellstorff, T. (2000). *The Gay Archipelago: Postcolonial Sexual Subjectivities in Indonesia* (PhD). Stanford University, Stanford.
- Brenner, S. (1995). Why Women Rule the Roost: Rethinking Javanese Ideologies of Gender and Self-Control. In A. Ong & M. G. Peletz (Eds.), *Bewitching Women, Pious Men: Gender and Body Politics in Southeast Asia* (pp. 19-50). Berkeley: University of California Press.
- Brown, D., & Wilson, I. (2007). Ethnicized violence in Indonesia: Where criminals and fanatics meet *Nationalism and Ethnic Politics*, 13(3), 367-403. doi:10.1080/13537110701451579
- Davies, S. G. (2007). *Challenging Gender Norms: Five Genders among Bugis in Indonesia*. Boston: Thomson Wadsworth.
- Davies, S. G. (2011). *Gender Diversity in Indonesia: Sexuality, Islam, and Queer Selves*. London: RoutledgeCurzon.
- Hukum online. (2012). Memosisikan polisi dalam aksi vigilante. (5 September). Retrieved from <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt504708a791630/memosisikan-polisi-dalam-aksi-vigilante>
- Imparsial the Indonesian Human Rights Monitor. (2012). Siaran Pers No. 04/Siaran Pers/Imparsial/II.2012. Retrieved from <http://www.imparsial.org/id/2010/menyikapi-kejahatan-premanisme-kelompok-vigilante-dan-operasi-aparat-keamanan.html>
- JakartaGlobe. (2015). Ramadan raises fears of vigilante groups. *beritasatu.com*. Retrieved from <http://jakartaglobe.beritasatu.com/news/ramadan-raises-fears-vigilante-groups/>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia [Kemenkes]. (2015). *Laporan Perkembangan HIV-AIDS Triwulan IV Tahun 2014, tanggal laporan 12 Februari 2015*. : Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penyehatan Lingkungan (CDC), Kementerian Kesehatan.
- Larasati, B. (2015). [Jurnal] Lebih Dekat Dengan Prinsip-prinsip Yogyakarta: Ruang Perlindungan LGBT Dalam Kerangka Hukum HAM Internasional. In *SuaraKita*. Retrieved from <http://>

- [www.suarakita.org/2015/02/jurnal-lebih-dekat-dengan-prinsip-prinsip-yogyakarta-ruang-perlindungan-lgbt-dalam-karangka-hukum-ham-internasional/](http://www.suarakita.org/2015/02/jurnal-lebih-dekat-dengan-prinsip-prinsip-yogyakarta-ruang-perlindungan-lgbt-dalam-karangka-hukum-ham-internasional/)
- Locher-Scholten, E., & Niehof, A. (Eds.). (1992). *Indonesian Women in Focus*. Leiden: KITLV Press.
- Mboi, N., & Smith, K. H. (2006). Current status of HIV/AIDS in Indonesia and prospects for its spread. In T. Yamamoto & S. Itoh (Eds.), *Indonesia: Fighting a rising tide: The response to AIDS in East Asia* (pp. 96-118). Tokyo: Japan Center for International Exchange.
- Oetomo, D. (1996). Gender and Sexual Orientation in Indonesia. In L. Sears (Ed.), *Fantasicizing the Feminine in Indonesia* (pp. 259-269). Durham: Duke University Press.
- Oetomo, D. (2001). *Memberi Suara Pada Yang Bisu (Giving a Voice to the Silent)*. Yogyakarta Galang Press.
- Republika Online. (2011). Studi: Kelompok 'Vigilante' terbanyak lakukan kekerasan berbau agama. *Republika Online*(24 Januari). Retrieved from <http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nasional/11/01/24/160270-studi-kelompok-vigilante-terbanyak-lakukan-kekerasan-berbau-agama>
- Riono, P., & Jazant, S. (2004). The current situation of the HIV / AIDS Epidemic in Indonesia. *AIDS Education and Prevention*, 16(Supplement A), 78-90.
- Robinson, K. (2000). Indonesian Women - From Orde Baru to Reformasi. In L. Edwards & M. Roces (Eds.), *Women in Asia: Tradition, Modernity and Globalisation* (pp. 139-169). Sydney: Monash University Press.
- Sen, K. (1996). Indonesian Women at Work. In K. Sen & M. Stivens (Eds.), *Gender and Power in Affluent Asia* (pp. 35-62). London: Routledge.
- Setyawan, B. (2014). 50 tahun Kompas menjelajah kerasnya belantara media. Retrieved from [http://www.kompasiana.com/bamset2014/50-tahun-kompas-menjelajah-kerasnya-belantara-media\\_558fd18af392730b16e25cf1](http://www.kompasiana.com/bamset2014/50-tahun-kompas-menjelajah-kerasnya-belantara-media_558fd18af392730b16e25cf1)
- Surtees, R. (2004). Traditional and emergent sex work in urban Indonesia. *Intersections: Gender and Sexuality in Asia and the Pacific*(10).
- Suryakusuma, J. (1987). State Ibuism: The Social Construction of Womanhood in the Indonesian New Order. *New Asian Visions*, 46-69.
- Tempo. (2015). MUI keluarkan fatwa hukum mati kaum homoseksual. (17 Maret). Retrieved from <http://nasional.tempo.co/read/news/2015/03/17/078650564/mui-keluarkan-fatwa-hukum-mati-kaum-homoseksual>
- UNAIDS. (2010). *Getting to zero: 2011-2015 strategy Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS)*.
- UNAIDS. (2011). UNAIDS terminology guidelines (October). Retrieved from [http://www.unaids.org/sites/default/files/media\\_asset/JC2118\\_terminology-guidelines\\_en\\_0.pdf](http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/JC2118_terminology-guidelines_en_0.pdf)
- UNAIDS. (2013). *HIV in Asia and the Pacific*: UNAIDS.
- van Bemmelen, S. (1992). *Women and Mediation in Indonesia*. Leiden: Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) Press.
- Wieringa, S. (1992). Ibu or the Best: Gender Interests, Ideology, and Practice in Two Indonesian Women's Organizations. *Feminist Review*, 41, 98-114.
- Wieringa, S. (1997). Jakarta's Butches: Transgendered Women or Third Gender? Symposium conducted at the meeting of the Beyond Boundaries: Sexuality Across Culture, Amsterdam.

## Catatan Belakang

1. Berdasarkan UU No 16/1960, MPRS selanjutnya diubah menjadi MPR-RI setelah pemilu pertama tahun 1971.
2. Misalnya sebuah artikel berjudul 'Ulah pasangan gay kelewatan batas' bercinta di kuburan <http://www.tribunnews.com/regional/2012/09/03/birahi-tinggi-pasangan-homo-bercinta-di-kuburan>.

### **Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari**

- Prof. Mayling Oey-Gardiner
  - Prof. Jeffrey Winters
- Prof. Rachmi Diyah Larasati
  - Prof. Merlyna Lim
  - Dr. Kristi Poerwandari
  - Dr. Ida Ruwaida Noor
  - Dr. Arianti Ina Restiani
  - Dr. Phil. Ratna Noviani
- Tracy Wright Webster, PhD.
  - Sari Andajani, PhD.



**ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH**  
**JURNAL PEREMPUAN**

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

**Jurnal Perempuan** (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan mengurai persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, otentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada ([redaksi@jurnalperempuan.com](mailto:redaksi@jurnalperempuan.com)).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan sub bagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa sub bab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Metode Penelitian** berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. **Pembahasan** disajikan dalam sub bab-sub bab dengan penjadualan sesuai dalam kajian teori feminism dan atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Penutup** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Belakang** (*end-note*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia, 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum, 2003) untuk dua pengarang, dan (Arivia et al., 2003) untuk lebih dari dua pengarang. Contoh:

Arivia, Gadis. 2003. *Filsafat Berperspektif Feminis*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.

Amnesty International. 2010. *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*. Diakses pada 5 Maret, jam 21.10 WIB dari:  
[http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational\\_for\\_PSWG\\_en\\_Indonesia.pdf](http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf)

Candraningrum, Dewi (Ed). 2014. *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.

Dhewy, Anita. 2014. "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election" dalam *Indonesian Feminist Journal* Vol.2 No.2 August 2014. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan Press. (pp: 130-147).

KOMPAS. "Sukinah Melawan Dunia". 18 Desember 2014:14:02 WIB.  
<http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi [redaksi@jurnalperempuan.com](mailto:redaksi@jurnalperempuan.com) untuk mendapatkan petunjuk.

**Catatan Jurnal Perempuan:** Mengapa SOGIE (*Sexual Orientation, Gender Identity and Expression*)?.....

**Artikel / Articles**

- Selarung Gerakan Lesbian dalam Epidemi Kebencian: Awal Advokasi SOGIE (*Sexual Orientation, Gender Identity and Expression*) di Nusantara / *Plurality of Lesbian Movements under Hatred-Epidemic: Initiation of SOGIE Advocacy in Nusantara*..... 269-288  
*BJD. Gayatri*
- Diri, Tubuh dan Relasi: Kajian atas Transgender FTM (*Female to Male*) di Jakarta / *Self, Body, and Relation: a Study of FTM Transgender in Jakarta*..... 289-302  
*Sri Agustine, Evi Lina Sutrisno & Dewi Candraningrum*
- "Mengapa Saya Mendirikan Suara Kita?" Sebuah Memoar / "Why I founded Our Voice": a Memoir ..... 303-308  
*Hartoyo*
- Penyebab atau Penyembuh? Kekerasan Seksual terhadap Lesbian, Biseksual, dan Transgender *Female-to-Male* di Indonesia / *Causes or Cures? Sexual Violence against Lesbian, Bisexual and Transgender Female-to-Male in Indonesia*..... 309-314  
*Ayu Regina Yolandasari*
- Razia terhadap LGBT sebagai Agenda Moralitas Palsu: Kajian Pemberitaan Media di Indonesia / *Raids against LGBT as Fake Moral Agenda: a Study on News Media in Indonesia*..... 315-320  
*Sari Andajani, Dinar Lubis & Sharyn Graham-Davies*
- Politik Gender dan Seksualitas: Transgender Indonesia dalam Konteks Masyarakat Indonesia dan Eropa Barat / *Gender Politics and Sexuality: Indonesian Transgender in the Context of Indonesia and Western Europe Society* .....  
*Tanti Noor Said* 321-327
- Memetakan Tubuh, Gender, dan Seksualitas dalam Kajian Queer / *Mapping Body, Gender, and Sexuality in Queer Studies*..... 329-338  
*Hendri Yulius Wijaya*
- Hak Asasi Manusia LGBT dalam Kebijakan Dalam Negeri Indonesia / *LGBT's Human Rights in the Indonesian Interior Policies*..... 339-355  
*Yulianti Muthmainnah*
- LGBT, Agama dan HAM: Kajian Pemikiran Khaled M. Abou El-Fadl / *LGBT, Religion, and Human Rights: a Study on Khaled M. Abou El-Fadl's Thoughts* ..... 357-366  
*Masthuriyah Sa'dan*
- "Makna Hidup" Bagi LGBT Ketika Negara Abai: Kajian Queer di Jakarta / "Meaning of Life" for LGBT when State Ignores: a Queer Study in Jakarta ..... 367-376  
*Gadis Arivia dan Abby Gina*

**Wawancara / Interview**

- David Kloos: "Perempuan Konservatif Mendominasi Formasi Kepemimpinan" / *David Kloos: "Conservative Women dominate Formation of Leadership"* ..... 377-381  
*Saras Dewi*

**Kata dan Makna / Words and Meanings**..... 383-385

**Profil / Profile**

- Hana Salomina Hikayobi: "Terpanggil untuk Menyuarkan Kaum Tak Bersuara" / *Hana Salomina Hikayobi: "Compelled to voice the Voiceless"* ..... 387-392  
*Dewi Candraningrum & Anita Dhewy*

**Resensi Buku/ Book Review**

- Tombois dan Femmes: Menantang Label Gender di Padang / *Tombois and Femmes: Against Gender Label in Padang* ..... 393-395  
*Nadya Karima Melati*

**Tokoh / Heroine**

- Tunggal Pawestri: "Dukungan Terbuka terhadap LGBT akan Mengundang Dukungan Yang Lain" / *Tunggal Pawestri: "Open Support for LGBT invite Other Support"* ..... 397-404  
*Anita Dhewy*

